

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI WISATA RELIGI
MAKAM SUNAN BONANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh :

RAFI'ATUS SAFIRA ALFATH

NPM. 21801091138



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2025

RINGKASAN

Rafi'atus Safira Alfath, NPM 21801091138, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, ***Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Sunan Bonang***. Dosen Pembimbing I Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II Taufiq Rahman Ilyas, S.AP.,M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Wisata Religi Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengadopsi model kolaborasi Ansell dan Gash (2008) yang melibatkan empat indikator: kondisi awal, fasilitas kepemimpinan, desain institusional, dan proses kolaboratif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, yayasan pengelola wisata, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* berperan signifikan dalam keberlangsungan sejarah awal untuk mengkaji ketimpangan sumber daya dari kolaborasi yang dijalankan, penyediaan fasilitas wisata yang memadai, adanya desain intuisi yang ditampakkan pada adanya aturan dari kedua belah pihak, dan berjalannya proses kolaborasi yang ditunjukkan dengan adanya rapat koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, masalah kemacetan akibat mobilitas becak wisata, dan aktivitas pemalakan yang dilakukan oleh pengemis dan penjual parfum di sekitar wisata sunan bonang. Faktor pendukung keberhasilan kolaborasi meliputi: antusias masyarakat yang mampu memacu ekonomi lokal, adanya fasilitas yang memadai serta sumber dana yang memadai.

Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran masing-masing aktor dalam proses kolaboratif, pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, dan penyempurnaan mekanisme retribusi untuk mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan destinasi wisata serupa di wilayah lain, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Wisata Religi, Kesejahteraan Masyarakat

SUMMARY

Rafi'atus Safira Alfath, NPM 21801091138, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Islam Malang. Collaborative Governance in Improving Community Welfare through Sunan Bonang Religious Tourism. Advisor I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si. Advisor II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP*

This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in improving community welfare through the management of Sunan Bonang Religious Tourism in Tuban, East Java. Employing a descriptive qualitative approach, the study adopts Ansell and Gash's (2008) collaboration model, encompassing four indicators: initial conditions, leadership facilitation, institutional design, and collaborative processes. Data were collected through observation, interviews, and documentation, engaging various stakeholders, including local government, tourism management foundations, local communities, and the private sector.

The findings reveal that collaborative governance significantly contributes to the historical continuity of assessing resource disparities in collaboration, the provision of adequate tourism facilities, institutional designs reflected in agreed regulations, and effective collaborative processes demonstrated through coordination meetings among stakeholders. However, several challenges persist, such as traffic congestion caused by the mobility of pedicabs and disruptive activities by beggars and perfume sellers around the Sunan Bonang tourism area. Factors supporting successful collaboration include public enthusiasm that boosts the local economy, adequate facilities, and sufficient financial resources.

This study recommends optimizing the roles of each actor in collaborative processes, improving traffic management, and refining the retribution mechanisms to support sustainable tourism development. The findings are expected to serve as a reference for managing similar tourist destinations in other regions, with the aim of enhancing community welfare and promoting local economic sustainability.

Keywords: *Collaborative Governance, Religious Tourism, Community Welfare*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu Negara Kepulauan terbesar didunia dan merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek yang terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam mendapatkan devisa negara (Yakup, 2019:1). Salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ialah sektor pariwisata, hal ini dibuktikan melalui literatur perkembangan sektor wisata yang menjadi salah satu industri terbesar yang ditandai dengan banyaknya fluktuasi kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang didapatn dari turis internasional (Natalia, 2018).

Pariwisata sendiri didefinisikan sebagai salah satu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki maksud dan tujuan untuk menghilangkan rasa stress dengan menikmati pemandangan yang disuguhkan obyek wisata (Hariadi, 2019:1). (Maryani, Muchsin, & Ilyas, 2021:58) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu setor yang bersumber dari penerimaan Negara. Selaras dengan pernyataan tersebut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai suatu kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan salah satu bentuk kegiatan individu (perorangan) atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain dengan maksud dan tujuan untuk merelaksasikan diri dan pikiran, kegiatan diselenggarakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah atau pemerintah daerah yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang kebutuhan wisatawan.

Menurut (Yakup, 2019) Pariwisata memiliki pengaruh terhadap perekonomian melalui beberapa seperti aspek setor pariwisata, aspek pengembangan wisata, aspek kontribusi peningkatan kinerja, dan pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang mampu menghasilkan *outcome* berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pariwisata merupakan potensi wisata yang tidak hanya dimiliki oleh wilayah nasional saja, namun pariwisata juga dimiliki oleh setiap daerah baik yang berupa wisata alam, budaya, maupun buatan dan lain – lain. sehingga dalam hal ini dapat diindikasi bahwa pariwisata memang dimiliki oleh setiap daerah (Kurniawan, 2013:47). Pada literatur yang dikaji oleh (Hutami, 2022), menyebutkan bahwa pariwisata yang ada pada suatu daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk

mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berimbang Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang disebut sebagai PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang – Undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah di jelaskan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dikarenakan saat ini sektor wisata merupakan sektor yang dijadikan sebagai kebutuhan bagi masyarakat sehingga *trend* akan kegiatan pariwisata berdampak bagi wilayah yang dikenai oleh pariwisata tersebut.

Dampak wilayah yang merasakan perkembangan setor wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi pariwisata di wilayah Jawa Timur yang mana menjadi salah satu wilayah Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai wisatawan nusantara dengan kunjungan terbanyak terhitung pada Januari hingga Juni 2023.

Tabel 1.1. Fluktuasi Kunjungan Wisatawan Domestik Semester 1 2023

No.	Provinsi	Nilai/Kunjungan
1.	Jawa Timur	116.702.650
2.	Jawa Barat	75.460.440
3.	Jawa Tengah	63.098.430
4.	DKI Jakarta	30.072.770
5.	Banten	20.814.960
6.	D.I Yogyakarta	16.117.640
7.	Sumatera Utara	14.333.140
8.	Sulawesi Selatan	14.323.410
9.	Bali	9.719.510
10.	Sumatera Barat	7.745.590

Sumber : (databoks.katadata.co.id, 2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh (databoks.katadata.co.id, 2023) menyatakan bahwa terdapat 433,57 juta perjalanan domestik dari wisatawan nusantara atau turis lokal sepanjang semester I 2023. Jumlah ini meningkat 12,57% dari periode sebelumnya tahun 2022 yang tercatat 385,16 juta perjalanan. Berdasarkan tujuannya, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang paling banyak dikunjungi turis lokal. Jumlahnya mencapai 116,70 juta kunjungan atau setara dengan 26,92% dari total perjalanan wisatawan nusantara.

Sedangkan untuk kunjungan pariwisata mancanegara per juli tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12,64% dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara perjuni tahun 2023 mencapai 18.025 kunjungan. Kemudian pada akumulasi bulan yang sama tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 233,55 persen atau 14.216 kunjungan, dengan jumlah wisatawan mancanegara pada Juli 2022 sebanyak 6.087 kunjungan (BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 2023).

Sehingga capaian PAD pada tahun 2023 pada setor wisata memiliki kenaikan sebesar 4.66 Triliun yang mana pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur hanya mencapai 21.26 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2023 PAD pariwisata Provinsi Jawa Timur mencapai 487 Triliun rupiah (radarbanyuwangi.jawapos.com, 2023). Dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati obyek wisata di masing – masing daerah tentu akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan pertumbuhan daerah tersebut.

Pariwisata cenderung memiliki sifat kompleks dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dalam pengelolaan pariwisata perlu adanya tata kelola kolaborasi pemerintahan (*collaborative governancet*) melalui beberapa stakeholder lain mulai dari sektor swasta, pemerintah maupun masyarakat, agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan memberikan manfaat bagi khalayak luas (Hariadi, 2019:2). Pariwisata adalah sektor integrasi yang tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada kerjasama *collaborative governancet* dan daya dukung dari berbagai pihak, integrasi tersebut dapat berupa kegiatan utama wisata seperti kuliner, souvenir, aksesibilitas, transportasi dan lain – lain yang mana kegiatan tersebut merupakan peran dari UMKM untuk memberikan kesempatan kerja pada warga sekitar dan menambah pengalaman dari pengunjung untuk menikmati tempat wisata (Imaniar & Wahyudiono, 2019).

Sehingga dalam aspek *collaborative governance* terdapat beberapa elemen penting yang ada di dalamnya mulai dari aktor pelaksana serta kegiatan

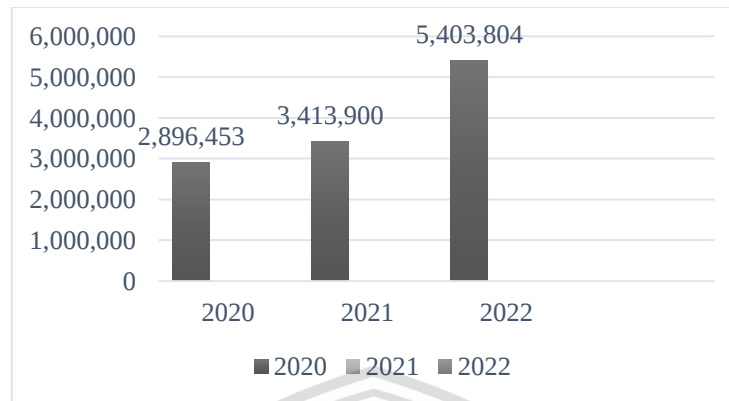
penunjang kolaborasi yang mengharuskan adanya aktor – aktor yang kompeten. Hal ini selaras dengan pernyataan dari (Ansell & Gash, 2007) bahwa ada beberapa persyaratan terciptanya proses kolaborasi mulai dari terdapatnya partisipasi para pemangku kepentingan, terdapatnya kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan dan terdapatnya aktor – aktor yang kompeten.

Muncul dan berkembangnya kegiatan pariwisata dalam suatu daerah dikarenakan wilayah tersebut memiliki obyek spesifik serta keunikan yang dapat menarik daya tarik seseorang yang ada ditempat lain untuk mengunjungi tempat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa wisata merupakan unsur yang memiliki hakikat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman serta kelokalan yang menarik banyak orang untuk melakukan pekerjaan (Zaenuri, 2017). Tuban merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman obyek wisata baik wisata alam, budaya dan buatan. Kabupaten tuban terkenal dengan julukan Kota Wali, hal ini dikarenakan tuban menjadi salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran Agama Islam. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARD) Kabupaten Tuban dalam (Wicaksono & Idajati, 2019:157) dijelaskan bahwa terhitung tahun 2016 kawasan wisata di Kabupaten Tuban dibagi menjadi beberapa zona, dari beberapa zona tersebut dibentuk pula wisata unggulan daerah yang berfokus pada zona Kawasan Strategis Pariwisata Daerah I, pada KSPD I terdiri dari dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Tuban dan Kecamatan Semanding. Didalam zona KSPD I terdapat wisata religi

unggulan yang acap kali menjadi primadona wisatawan domestik yakni Wisata Makam Sunan Boanang.

Wisata Religi Makam Sunan Bonang berlokasi di Jl. Bonang Dusun Kauman Gang IV Desa Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur (Karlasari, 2023). Lokasi pemakaman Sunan Bonang sendiri terletak dekat dengan alun – alun Tuban, sedangkan aktivitas yang ada dalam wisata religi makam sunan bonang sendiri terdiri dari dua unsur aktivitas yakni aktivitas spiritual dan aktivitas historis. Aktivitas sepiritual dilakukan di Masjid Astana yang biasanya para peziarah melakukan sholat dan mengaji sambil menunggu waktu untuk kunjungan ziarah, disamping digunakan untuk ibadah sholat berjamaah para pengelola biasanya juga mengadakan istighosah rutin pada hari Selasa malam Rabu. Aktivitas spiritual dilaksanakan pada halaman 1 dan 2 kompleks pemakaman Sunan Bonang (Allan & Karmilah, 2017:93). Lebih lanjut (Allan & Karmilah, 2017:94) memaparkan bahwa aktivitas historis dilakukan dengan kegiatan ziarah makam sebagai salah satu kegiatan ziarah untuk mmeperingati wafatnya Sunan Bonang. Wisata religi makam sunan bonang juga menjadi destinasi primadona bagi para pengunjung untuk melakukan wisata religi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pelancong dalam kurun waktu 3 tahun terkahir.

Bagan 1.1. Jumlah Kunjungan Wisata Religi Makam Sunan Bonang



Sumber : (BlokTuban.com,2023)

Menurut data dari Sofyana (2023) dalam (BlokTuban.com,2023) jumlah pengunjung wisata religi makam sunan bonang tahun 2020 berjumlah 2.896.453 orang kemudian 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding tahun 2021, hal ini didapati dalam satu tahun terakhir jumlah kunjungan wisata religi makam sunan bonang mencapai 5.403.804 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata religi makam sunan bonang hanya mencapai 3.413.900 pengunjung.

Pernyataan tersebut selaras dengan penuturan Jamal Ghofir selaku Wakil Sekretaris Yayasan Mabbarot Sunan Bonang yang dikutip oleh (Novriansyah, 2022) yang mana pada tahun 2022 pengunjung Makam Sunan Bonang meningkat hingga 80 % dibanding tahun sebelumnya, beliau mengatakan “Mulai bulan Rajab sampai Sya’ban kemarin semenjak dibukanya keran wisata terutama religi pengunjung semakin membludak, pengunjung yang datang ke Makam Sunan Bonang tahun ini mencapai hingga 80 % dibanding tahun sebelumnya”.

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya fluktuasi peningkatan kunjungan Wisata religi makam sunan bonang yang terus mengalami peningkatan mengindikasi bahwa obyek Wisata religi makam sunan bonang memiliki daya tarik yang luar biasa dalam menarik perhatian wisatawan dalam bidang kepariwisataan. Selaras dengan pernyataan tersebut Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menyebutkan bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menjadi obyek wisata religi yang digandrungi oleh banyak wisatawan, Wisata Religi Sunan Bonang tidak lepas dari kolaborasi tata kelola pemerintahan (*collaborative governance*) pada bidang pengelolaan wisata, dalam mengelola sektor pariwisata religi makam sunan bonang ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban yang berperan sebagai penyelenggaraan serta penyedia fasilitas pendukung di Wisata religi makam sunan bonang berkolaborasi dengan BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai pengawas serta Yayasan Mabbarot Sunan Bonang yang berperan sebagai pengelola dan merawat sarana dan prasarana yang ada (Wicaksono & Idajati, 2019).

Collaborative governance Wisata Religi Makam Sunan Bonang ditampakkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai berupa sarana penunjang wisata yakni berupa Gazebo, sarana Peribadatan yang disediakan oleh pihak pengelola berupa Mushola, sarana penjualan yang telah disediakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban berupa pertokoan yang menjual barang – barang bertema Islami serta oleh – oleh khas tuban berupa batik, kaos dan lain sebagainya, dan yang terakhir ialah sarana Sanitasi Wisata Religi Makam Sunan Bonang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Sebagai bentuk sinergitas pengembangan pariwisata, *collaborative governance* juga ditampakkan melalui sinergitas masyarakat sekitar pariwisata untuk menunjang perekonomian dengan menyediakan penyewaan toilet umum berbayar untuk wisatawan (Wicaksono & Idajati, 2019). Dengan masyarakat yang ikut andil memanfaatkan potensi wisata Sunan Bonang maka akan membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap menjadikan efektifitas *collaborative governance* yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan obyek wisata berjalan dengan baik sehingga para wisatawan mampu menanamkan minatnya secara terus – menerus untuk mengunjungi Wisata Religi Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban. Namun dengan berjalannya pelaksanaan *collaborative governance* baik dan efektif tidak dipungkiri masih adanya permasalahan dalam pengembangan pariwisata religi makam sunan bonang Tuban.

Pertama, permasalahan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARD) Kabupaten Tuban tahun 2017 – 2037 lingkungan wisata religi makam sunan bonang memiliki permasalahan berupa akses menuju makam utama yang terhambat karena banyaknya UMKM yang berjualan di sepanjang jalan. Hal ini tentunya akan menghambat mobilitas pengunjung terkait kemudahan akses utama menuju makam Sunan Bonang sehingga pengunjung acap kali merasakan kurang nyaman karena para UMKM membuat jalur utama makam Sunan Bonang menjadi Kotor dan sempit.

Kedua, permasalahan terjadi pada tidak teraturnya penataan lalu lintas di tengah wisata religi makam Sunan Bonang hal ini disebabkan karena mobilitas ratusan Becak Wisata Religi Makam Sunan Bonang yang hampir setiap hari memadati arus jalan KH Mustain sampai dengan Jl AKBP Suroto yang mana kemacetan pada kedua titik persimpangan jalan tersebut tidak hanya memicu kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas namun juga melumpuhkan aktivitas masyarakat di sekitar museum, perkotaan dan sekolah di sepanjang jalur becak wisata (Jawaposradartuban.com, 2022).

Ketiga, penerapan tarif retribusi kumulatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada paguyuban becak wisata religi makam sunan bonang yang cukup mahal yakni mencapai 5 juta perbulan, hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah antara anggota paguyuban becak aktif dan non aktif yang masih terdata, hal ini menyebabkan ketimpangan perekonomian paguyuban becak yang kesulitan dalam membayar beban tarif retribusi tersebut

(Jawaposradartuban.com, 2022). Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Collaborative Governance dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisi *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian skripsi adalah manfaatnya. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, serta sebagai landasan bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Jawa, Yayasan Mabbarot Sunan Bonang, hingga masyarakat sekalipun sebagai sarana evaluasi pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Wisata Religi Makam Sunan Bonang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi sunan bonang di Kabupaten Tuban memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Yayasan Mabbarot Sunan Bonang, UMKM lokal, serta masyarakat menunjukkan hasil positif dalam pengembangan fasilitas wisata dan penyediaan layanan yang mendukung kenyamanan pengunjung. Kolaborasi ini sesuai dengan prinsip Ansell & Gash (2008) yang telah memenuhi empat indikator berikut :

1. Kondisi Awal, yang menunjukkan bahwa pada kondisi awal terdapat sumber daya dan lemahnya tata kelola birokrasi pemerintah Kabupaten Tuban, seperti masalah akuntabilitas dan pengelolaan aset, menjadi hambatan besar dalam pengelolaan Wisata religi makam sunan bonang. Sebaliknya, Yayasan Mabbarot, dengan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan sosial dan hubungan historisnya, mampu meningkatkan pemasukan dan efektivitas pengelolaan. Konflik antara pemerintah dan yayasan menggarisbawahi pentingnya tata kelola kolaboratif berbasis dialog, integrasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya.

2. Fasilitas Kepemimpinan, dalam pelaksanaan *collaborative governance* untuk mensejahterakan masyarakat melalui wisata religi sunan bonang. fasilitas kepemimpinan yang disuguhkan telah mencapai kondisi lengkap dan baik yang mana fasilitas ini tersedia atau disediakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban), dan Yayasan Mabarro. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dan Yayasan Mabarro bekerja bersama untuk menyediakan fasilitas fisik seperti ruang tunggu, masjid, dan gazebo, serta memanfaatkan platform digital "Ayo Ning Tuban" untuk promosi wisata.
3. Desain Intuisi, dalam kolaborasi Wisata Religi Sunan Bonang mencerminkan pembagian peran yang saling melengkapi antara Dinas Pariwisata dan Yayasan Mabarro, meskipun tanpa aturan formal bersama. Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator strategis melalui kebijakan pemerintah daerah, sedangkan Yayasan Mabarro menetapkan aturan operasional berdasarkan ADART untuk memastikan pelayanan yang tertib.
4. Proses Kolaborasi, proses kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Yayasan Mabarro Sunan Bonang ditunjukkan dengan adanya diskusi seperti rapat koordinasi tahunan, para pemangku kepentingan membahas strategi pengembangan wisata dan menyelesaikan perbedaan pandangan secara musyawarah. Komunikasi yang rutin dan

inklusif memperkuat kepercayaan, sementara komitmen bersama untuk memajukan wisata religi menjadi fondasi keberlanjutan sinergi. Proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada dinamika hubungan yang aktif dan inklusif, bukan hanya pada struktur formal.

Dalam penelaahan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi makam sunan bonang peneliti terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam kajian ini seperti:

1. Faktor pendukung, adanya antusias pengunjung yang mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat sekitar dan memperkuat kunjungan destinasi wisata religi makam sunan bonang sehingga peningkatan jumlah wisatawan ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang tercermin pada PDB dan PDRB Kabupaten tuban. Kemudian, faktor pendukung selanjutnya ialah kelengkapan fasilitas, yang mana fasilitas yang ada di area wisata religi makam sunan bonang telah mencapai kelengkapan yang cukup baik dimana hal ini ditunjukkan pada kelengkapan beberapa fasilitas seperti seperti tempat makan, toilet, tempat wudhu, masjid, gazebo untuk istirahat, dan keberadaan pemandu wisata memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Yang terakhir ialah adanya sumber dana kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Yayasan Mabarroth menggabungkan dana APBD untuk pelestarian dan pengembangan serta infaq berbasis keikhlasan dari peziarah, menunjukkan integrasi sektor publik dan yayasan dalam

menciptakan kesejahteraan. Kolaborasi ini mencerminkan upaya bersama dalam melestarikan cagar budaya sekaligus meningkatkan kualitas layanan, yang selaras dengan pandangan bahwa kesejahteraan memerlukan sinergi lintas sektor dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Faktor penghambat, dimana di temukan bahwa hal ini ditengarai oleh tantangan signifikan wisata religi makam sunan bonang, seperti kemacetan lalu lintas akibat mobilitas becak wisata yang tidak teratur, penataan UMKM yang menghambat akses ke lokasi makam, serta penerapan retribusi yang membebani sebagian pihak yakni pengayuh becak wisata religi makam sunan bonang. Masalah-masalah lain juga muncul dari adanya parktek pemalakan yang dilakukan oleh pengemis dan penjual parfum begitupun dengan aksi pemaksaan penyewa MCK yang memaksakan peziarah untuk menggunakan atau menyewa toiletnya hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terkoordinasi dan inklusif, yang mencakup partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, adapun saran yang diharapkan untuk mengatasi hampatan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam menjalankan *collaborative governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata religi sunan bonang ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu mengatur mobilitas becak wisata dengan menetapkan jalur khusus dan kapasitas maksimum yang dapat beroperasi setiap harinya di kawasan makam. Sehingga perlu juga pembenahan pada area alternatif khusus shuttle bus yang di tetapkan untuk mengurangi kemacetan di sekitar wisata
2. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan penyesuaian tarif retribusi untuk paguyuban becak wisata religi makam sunan bonang agar lebih menekankan proporsionalitas dengan pendapatan mereka, yang dilakukan melalui forum diskusi untuk lebih menjaga rasa keadilan dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pemerintah dan Yayasan Mabarroth perlu meningkatkan kolaborasi dalam menambah fasilitas umum seperti toilet, tempat istirahat, dan area parkir yang memadai untuk mengatasi lonjakan pengunjung pada waktu-waktu tertentu.
4. Pemerintah dan Yayasan Mabarroth perlu menekankan kolaborasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan atau dengan Polres Kabupaten Tuban dalam hal pengawasan aktivitas atau praktik-praktik yang mengganggu kenyamanan pengunjung, seperti pemaksaan dari pedagang parfum atau pengemis. Dan memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan seperti halnya praktek pemalakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Afifuddin, & Anadza, H. (2020). Strategi Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menenggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar). *Jurnal Respon Publik Vol.4 No.2*, 11-23.
- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agranoff, R., & Mcguire, M. (2005). Collaborative Public Management : New Strategies for Local Government. *The Journal of Politics* 67(1), 637-639.
- Akbar, M. (2021). *Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme (Studi Kasus di Polres Barito Kuala) [Skripsi]*. Kalimantan: ePrints Uniska: Repository Universitas Islam Kalimantan.
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol 8, No 2*, 170-177.
- Allan, L. M., & Karmilah, M. (2017). Pengaruh Aktivitas Ziarah Terhadap Ruang Publik Alun - Alun Studi Kasus : Kawasan Pemakaman Sunan Bonang. *Jurnal Planologi Vol. 4 No. 2*, 89-101.
- Anggraini, F. S., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik, Vol. 17 No. 6*, 30-49.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice . *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ardianto, E. (2010). *Metode Penelitian Untuk Publik Relations : Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Simbiosia Rekatama.
- Arlina, E. S., Noor, H. M., & Irawan, B. (2020). Penataan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. *e-Jurnal Administrasi Publik*, 9415-9427.

- Arrozaaq, D. C. (2018). *Collaborative Governance (Studi Tantang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Minapolitan di Kibupaten Sidoarjo) [Skripsi Thesis]*. Repository Universitas Airlangga.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Prespektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2022). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Doktor Administrasi Publik Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. (2024, Juni 11). *Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa), 2021-2023*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban: <https://tubankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU5IzI=/jumlah-penduduk-per-kecamatan.html> (Diakses pada 12 Desember 2024)
- Baharuddin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. (2023, September 4). *Januari-Juli 2023, Kunjungan Wisman Meningkat 489,48 persen Dibandingkan Tahun Lalu*. Diambil kembali dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur: <https://bappeda.jatimprov.go.id/2023/09/04/januari-juli-2023-kunjungan-wisman-meningkat-48948-persen-dibandingkan-tahun-lalu/> (diakses pada 09 Januari 2024)
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burkat, A. J. (2006). *Perencanaan ekowisata*. Jakarta: Raja Pindo.
- Departement Of Political Science UIN Makasar. (2013). *Proceedings International Conference on Islam, Politics, Laws dan Social Sciences*. Makassar : Kedai Aksara .
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlullah, D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2020). *Tourism Economics and Policy 2nd Edition*. United Kingdom : Channel View Publications.
- Fisdiantara, C. (2013). *Pengaruh Dimensi Pelayanan dan Dimensi Fasilitas Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Universitas Kanjuruhan Malang [Skripsi]*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.

- Ghony, D., & Almanshur, F. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, S. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hariadi, A. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba [Skripsi]*. Makassar: Repository Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Hariyoko, Y. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Bambu Keputihan Kota Surabaya. *urnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 140-148.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kantitatif*. Jakarta: Humanika.
- Heryati, Y. (2019). Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapanallu di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 1*.
- <https://Liputan6.com>. (2004, November 1). *Pengelolaan Kompleks Makam Sunan Bonang Diperebutkan*. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/news/read/89050/pengelolaan-kompleks-makam-sunan-bonang-diperebutkan> (Diakses pada 08 Desember 2024)
- Hutami, S. Y. (2022). *Analisis Collaborative Government Dalam Pengkoordinasian Obyek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi [Skripsi]*. Jambi: Universitas Jambi.
- Imaniar, D., & Wahyudiono, A. (2019). Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik*.
- Jawaposradartuban.com. (2022, Februari 21). *Tiap Hari Macet, Mungkinkah Sepanjang Jalan Becak ini Dipasang Median?* Diambil kembali dari Jawa Pos Radar Tuban.
- Kamal, M., & Dewangga, V. (2022). Peluang dan Tantangan Becak Wisata Dalam Mendukung Pariwisata di Kabupaten Jember . *Jurnal Master Pariwisata, Vol. 8 No.2*.
- Karlasari, D. N. (2023, Mei 26). *Wisata Religi di Masjid Agung Tuban Tempat Sunan Bonang Mengajarkan Agama Islam* . Diambil kembali dari [KilasKlaten.com: https://klaten.pikiran-rakyat.com/melancong/pr-2416701480/wisata-religi-di-masjid-agung-tuban-tempat-sunan-bonang-mengajarkan-agama-islam](https://klaten.pikiran-rakyat.com/melancong/pr-2416701480/wisata-religi-di-masjid-agung-tuban-tempat-sunan-bonang-mengajarkan-agama-islam)

- Khifidhoh, N. (2016). *Wisata Religi Sunan Bonang dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban [Skripsi]*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kurniawan. (2013). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kebaupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 1*.
- Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Martomo, Y. P. (2017). *Collaborative Governance Sebagai Basis pengelolaan Public Affairs*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Maryani, U. S., Muchsin, S., & Ilyas, T. R. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau Ruang Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ruang Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Kantor Koordinator Pariwisata dan Masyarakat Kecamatan Riung). *Jurnal Respon Publik Vo. 15 No. 5*, 58-63.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3*. USA: Sage Publication, Inc.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota WAikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol.1 VI, No.02*, 140-147.
- Moreta, A., & Harirah, Z. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021 - 2022. *Journal of Social Policy Issues Vol. 3 No. 3*, 107-112.
- Muhamad, N. (2023, Agustus 03). *Provinsi Tujuan Turis Lokal Terbanyak hingga Juni 2023, Jatim Kalahkan Bali*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/03/provinsi-tujuan-turis-lokal-terbanyak-hingga-juni-2023-jatim-kalahkan-bali#:~:text=Berdasarkan%20tujuannya%2C%20Jawa%20Timur%20tercatat,dari%20total%20perjalanan%20wisatawan%20nusantara>.
- Muhammad, J. A. (2021). Collaborative Governance Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 7, No 2*, 142-148.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

- Natalia, M. C. (2018). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Malang Raya*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.
- Novriansyah, R. (2022). *Jelang Ramadha, Peziarah Makam Sunan Bonang Meningkatkan Pesat*. Tuban: I News Tuban.
- Oktavani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang Vol. 3 No. 1*, 1-16.
- Pakpahan, A. (2020). Kesejahteraan Masyarakat di Sungai Batu Sei. *Jurnal Sociopolitico vol. 2*, 126-130.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2018). *Geografi Kabupaten Tuban*. Diambil kembali dari emerintahan Kabupaten Tuban: <https://tubankab.go.id/page/geografi> (Diakses pada 20 Oktober 2024)
- Pratama, D. A., Cikusin, Y., & Ilyas, T. R. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Respon Publik. Vol. 16, No. 7*, 82-90.
- Putra, A. E. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tantang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mlang Bidang Pertamanan [Skripsi])*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2019). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shantika, B., & Mahagangga, I. A. (2018). Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Pulau Nusa Lembongan. *Jurnal Destinasi Pariwisata Vol. 6 No. 1*.

- Simanjuntak, B. A., & dkk. (2017). *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 1-2.
- Sodiqin, A. (2023, Agustus 04). *Wow, Kawah Ijen Ikut Sumbang PAD Jawa Timur dari Sektor Pariwisata yang Mencapai Total Rp 487 Triliun*. Diambil kembali dari Radarbanyuwangi.id:
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/travelling/752107061/wow-kawah-ijen-ikut-sumbang-pad-jawa-timur-dari-sektor-pariwisata-yang-mencapai-total-rp-487-triliun> (diakses pada 09 Januari 2024)
- Sofyana, S. W. (2023, Januari 10). *Selama Tahun 2022 Sebanyak 2.296.033 Orang Kunjungi Makam Sunan Bonang*. Diambil kembali dari BlokTuban.com:
<https://bloktuban.com/2023/01/10/selama-tahun-2023-sebanyak-2-296-033-orang-kunjungi-makam-sunan-bonang/>
- Stabler, M. J., Papatheodorou, A., & Sinclair, M. T. (2010). *The Economics of Tourism 2nd ed*. London: Routledge.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. .
- Sugiharto, E. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistika. *Jurnal Universitas Mulawarman* Vol. 4 No.2 , 32-36.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D. (2003). *Kamus Peelaajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Prespetif Al-Qur'an. *Journal Of Qur'an and Hadist Studies* Vol. 3 No. 1, 1-16.
- Sumarni, Zulkarnain, & Sugiyanta, I. G. (2012). Faktor-Faktor Pendorong dan Pnarik Wisatawan Berkunjung Ke Objek Wisata Gunung Dempo Kota Pagar Alam. *JPG (Jurnal Penelitian Geografi)*,

<https://media.neliti.com/media/publications/246827-faktor-faktor-pendorong-dan-penarik-wisa-4d88f977>.

Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2008). *Tourism and Development in the Developing World*. London: Routledge.

Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa (Prinsip, Penerapan, penelitian)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wakhid, A. A. (2016). *Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing (Anggota IKAPI).

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK-Ar-Raniry Press.

Wicaksono, W. A., & Idajati, H. (2019). Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang Berdasarkan Komponen Wisata Religi. *Jurnal Teknik ITS Vol. 8 No. 2*, 157-161.

Wilensky, L. H., & Lebeaux, C. (1965). *Industrial Society and Social Welfare*. New York: The Free Press.

Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia [Tesis]*. Surabaya: Repository Universitas Airlangga Surabaya.

Zaenuri, M. (2017). *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencanavolcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman (Tesis)*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.

